

POSISI POLITIK KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

T. Zulmizan F. Assagaff dan Khairul Anwar

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Political Role in the Implementation of Regional Head of Politics and Government. The purpose of this study is the political position of the head of the four regions in the periodization of political organization and governance in Pelalawan year period from 2006 to 2011. The approach used in this study is a qualitative approach, the unit of analysis of this study is related to the government party leaders in Pelalawan taken purposively. Based on the findings that the political position of the head region in the normal period of starting off in the administration sworn to politics and government in Pelalawan goes well. It was during the reign of Azmun Jaafar of the political activity is more prominent than governance. Then the position of head of regional politics in the period PLT (executing tasks) until definitive politics and government in the implementation of the transitional government Azmun just continue experiencing legal problems. Political position of the head region in the period without vice regent regent in politics and government administration, Rustam Effendi focused on public service issues. This makes he less bargaining power in the community.

Abstrak: Posisi Politik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Politik dan Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah posisi politik kepala daerah pada empat perodesasi dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan periode tahun 2006-2011. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, unit analisis penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pemerintahan tokoh di Kabupaten Pelalawan yang diambil secara purposive. Berdasarkan hasil penelitian bahwa posisi politik kepala daerah pada periode normal dari mulai dilantik sampai nonaktif dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik. Hal ini pada masa pemerintahan Azmun Jaafar dari sisi kegiatan politik lebih menonjol dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian posisi politik kepala daerah pada periode Plt (pelaksana tugas) sampai dengan definitif dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan hanya melanjutkan pemerintahan transisi Azmun yang mengalami permasalahan hukum. Posisi politik kepala daerah pada periode bupati tanpa wakil bupati dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan, Rustam Effendi berfokus pada masalah pelayanan publik. Hal ini membuat nilai tawarnya kurang di mata masyarakat.

Kata Kunci: kepala daerah, penyelenggaraan pemerintahan, posisi politik

PENDAHULUAN

Pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah dalam menyelenggarakan politik dan pemerintahan di daerah. Rakyat dan perwakilannya dan kepala daerah yang memimpin memiliki posisi yang strategis dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Posisi ini disebut dengan posisi politik kepala daerah dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Kepala daerah dalam menyelenggarakan politik dan pemerintahan perlu mendapatkan pengakuan dari konstituen baik secara formal maupun non formal. Sebab kurangnya pengakuan membuat kepala daerah kurang efektif dalam mencapai tujuan pemerintahannya.

Posisi politik kepala daerah sangat penting dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di dalam suatu pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan politik dan pemerintahan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh rakyat sebagai konstituenya.

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah yang merupakan wujud otonomi daerah salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Menariknya meneliti tentang Kabupaten Pelalawan dikaitkan dengan daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki kepala daerah dalam beberapa periode tertentu. Seperti periode pemerintahan pada saat adanya bupati dan wakil

bupati sesuai dengan pilihan masyarakat. Kemudian pada periode adanya pemerintahan hanya dijalankan oleh kepala daerah yang berstatus pelaksana tugas pada periode berikutnya pada saat hanya ada kepala satu kepala daerah yang memiliki pengakuan sebagai bupati definitif, namun tanpa didampingi oleh wakil bupati dan periode terakhir, dimana Kabupaten Pelalawan kembali dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati secara lengkap kembali, tetapi dengan person yang sudah berbeda.

Pada masa pemerintahan tersebut, jelas menarik untuk dilakukan suatu penelitian khususnya pada saat dalam penyelenggaraannya ditemukan beberapa fenomena yang mengarah pada penyelenggaraan politik dan pemerintahan di daerah. *Pertama*, Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan T. Azmun Jafar, SH dan Wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk Periode Masa Bakti 2001-2006 dan untuk periode kedua dilantik kembali Bupati T. Azmun Jaafar dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan H. Rustam Effendi Periode 2006 – 2011. Namun dalam perjalanannya Bupati Azmun Jaafar menghadapi masalah hukum setelah pada tahun 2008 ditetapkan sebagai tersangka, maka kepemimpinan Bupati Pelalawan di-Plt (Pelaksana Tugas) yang dijabat oleh wakil bupati yaitu H. Rustam Efendi. Kemudian pada Tanggal 27 Agustus 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI H. Rustam Effendi dilantik sebagai Bupati (definitif) setelah kasus T. Azmun Jaafar dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dalam perjalanannya perubahan status menjadi polemik oleh berbagai pihak. Khususnya bila dikaitkan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi bupati, seperti adanya ungkapan bupati seolah dengan berstatus sebagai pelaksana tugas bupati kurang dapat maksimal dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

Kedua, tanda tangan surat, kepala daerah dengan status pelaksana tugas dirasakan kurang efektif dalam menandatangani surat-surat tertentu dan kurang berwenang dalam penerbitan pe-

rizinan, pengesahan anggaran daerah, pemutasian pegawai, pelantikan pejabat eselon dan sebagainya sehingga menyebabkan berbagai kendala dalam perpolitikan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis tertarik melakukan kajian tentang posisi politik kepala daerah penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi politik kepala daerah pada empat perodesasi dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan periode tahun 2006-2011.

Carlton (2008) mendefinisikan bahwa politik adalah proses komplek yang melibatkan sikap warga negara dengan berbagai kepentingan, kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum dan lobbying, baik perumusan, penerapan dan penafsiran undang-undang. Kemudian Ishak (2010) mempertegas posisi politik masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan harapan, cita-cita dan kepentingannya baik melalui wakil-wakilnya di DPRD, menyampaikan langsung kepada pemerintah dan memanfaatkan saluran-saluran politik lainnya.

Kepala daerah adalah bupati dalam hal ini orang yang dipilih oleh rakyat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Kabupaten. Menurut Sembiring (2009) menyebutkan bahwa kepala daerah adalah pimpinan daerah yang sering di sebut Bupati atau Gubernur. Kemudian seorang kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, kemudian mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda, menyusun dan mengajukan RAPBD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian wakil kepala daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, membantu dalam koordinasi, memantau dan mengevaluasi, memberi-

kan saran, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila berhalangan dan menggantikan kepala daerah sampai akhir masa jabatannya bila kepala daerah berhalangan.

Pengertian tersebut mempertegas bahwa posisi politik adalah sebuah kedudukan untuk berkuasa, dalam rangka mewujudkan keinginan orang individu maupun kelompok tertentu. Jika dikaitkan dengan posisi politik kepala daerah, maka berarti sebagai kedudukan atau kewenangan kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Posisi politik merupakan kedudukan/wewenang/kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Masalah ini sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan kepala daerah. Menurut Pamudji (1995) fungsi kepemimpinan pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu fungsi pengambilan keputusan dan motivasi. Fungsi pengambilan keputusan yaitu salah satu kewajiban pemimpin adalah mengambil keputusan dalam rangka memecahkan masalah-masalah organisasinya.

Keputusan yang diambil harus dapat dimengerti oleh para pelaksana, untuk menghindari salah pelaksanaan, oleh karena itu setiap keputusan-keputusan harus diformulasikan dengan kata-kata yang terang dan jelas, terutama terang dan jelas bagi pelaksanaannya. Agar pemimpin dalam keadaan siap dalam mengambil keputusan yang tepat dan baik, maka perlu baginya disediakan data dan informasi yang aktual oleh staf dan bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi sangat perlu untuk diolah, disiapkan dan dikembangkan agar sewaktu-waktu dapat disajikan untuk keperluan pembuatan keputusan lainnya di seluruh organisasi. Motivasi, dalam rangka menggerakkan bawahan pemimpin wajib melakukan motivasi, yaitu usaha memberikan dorongan agar orang-orang mau bekerja atau bergerak secara sukarela untuk mencapai tujuan seefisien mungkin.

Pengambilan keputusan dan motivasi seperti yang telah diuraikan di atas dipandang sebagai tugas pokok yang diemban oleh seorang pemimpin. Dua hal tersebut mempunyai sasaran dua arah

yaitu keadaan masyarakat di luar pemerintahan dan kepada organisasi pemerintahan itu sendiri. Motivasi kerja yang tinggi akan mendorong prestasi kerja yang optimal dan efektifitas kerja yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian pendapat tentang posisi politik kepala daerah dan kepemimpinan, maka dapat dijelaskan posisi politik atau kedudukan atau kekuasaan dalam pemerintahan menjadikan hal yang sangat berarti atau penting kepada masyarakat yang dipimpin. Pemimpin bisa saja percaya diri dalam menjalankan roda pemerintahannya karena adanya dukungan dari masyarakat dalam memimpin, kemudian juga sebaliknya, pemimpin tidak merasa percaya diri dalam memimpin karena kurangnya dukungan dan atau karena tidak memiliki tokoh kepemimpinan yang dapat diandalkannya.

Posisi politik kepala daerah dalam organisasi pemerintah adalah sebagai pemimpin organisasi yang dibantu oleh pegawai negeri sipil dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Kedudukan kepala daerah di luar organisasi pemerintah daerah adalah dengan pihak lembaga legislative atau dewan perwakilan rakyat. Karena secara bersama-sama kepala daerah bekerjasama dengan DPRD dalam berbagai hal. Yudoyono (2002) untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang, antara legislatif dan eksekutif diberikan kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Artinya, diantara kedua institusi ini tidak dikenal hubungan secara hirarki atau tidak berlaku hubungan atasan dan bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah hubungan koordinatif atau kerjasama, bukan hubungan sub ordinat.

Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak bisa memasuki ranah politik dan DPRD tidak bisa memasuki ranah administrasi pemerintahan daerah. Dalam hubungan kemitraan DPRD dengan Pemda pada tahap operasionalisasi kebijakan yang telah disepakati bersama, tetap saja dimungkinkan adanya perbedaan-perbedaan pemikiran, pandangan, pendapat, sikap dan perilaku. Koordinasi antara

kedua lembaga ini dimaksudkan untuk melarang atau meniadakan perbedaan. Tetapi, koordinasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya misinformation terhadap langkah-langkah kebijakan yang harus diambil kepala daerah.

Selanjutnya Yudoyono (2002) menyebutkan bahwa buah dari peningkatan kualitas anggota DPRD dari sisi kemitraan dengan Pemda dalam menyusun anggaran, menyusun dan menetapkan berbagai peraturan daerah, serta dari sisi control adalah sejauhmana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap kepala daerah dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dalam hubungannya dengan lembaga legislatif, Sani (1985), mengemukakan kinerja lembaga legislatif dan anggota-anggotanya pada pokoknya dapat dipahami sebagai masalah hubungannya dengan berbagai pihak di luar badan legislatif seperti pihak eksekutif. Menurut kajian Lemhanas dalam Alfian (1990), fungsi lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi empat dimensi, yaitu: (1) dimensi sebagai wakil rakyat yang mencerminkan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, (2) dimensi legislatif, (3) dimensi pengontrolan jalannya pemerintahan, dan (4) dimensi lain yang belum tercakup dalam ketiga dimensi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan posisi politik kepala daerah di luar organisasi pemerintahan adalah berhubungan dengan lembaga perwakilan rakyat atau DPRD, juga langsung kepada masyarakat dalam menangani masalah proses penyerapan aspirasi dan komunikasi politik masyarakat dan dalam proses pembuatan kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah posisi politik kepala daerah pada empat periodisasi dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan periode tahun 2006-2011.

METODE

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pemerintahan tokoh di Kabupaten Pelalawan yang diwakilkan oleh anggota DPRD sebanyak satu orang, yakni H.M. Nazir, Kepala Daerah sebanyak dua orang

(Rustam Efendi dan H.M. Harris), tokoh masyarakat sebanyak satu orang (H. T. Saheran), dan PNS di lingkungan Pemkab Pelalawan sebanyak satu orang, yakni H. T. Muklis (Mantan Kabag Tata Pemerintahan).

Pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, di samping kuesioner, teknik pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui percakapan langsung, atau dikenal dengan interview atau wawancara antara peneliti dengan responden dan dokumentasi

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, pengukuran dapat diproses dengan berbagai macam cara antara lain: (a) dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase, (b) dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data (*array*), untuk selanjutnya dibuat tabel baik yang hanya berhenti di tabel saja, maupun yang diperoleh lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Politik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Politik

Proses Penyerapan Aspirasi dan Komunikasi Politik Masyarakat

- a. Penyerapan aspirasi (tindakan bupati dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat)

Dapat dikatakan bahwa proses penyerapan aspirasi dan komunikasi politik masyarakat yang dilihat dari tindakan bupati dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sudah cukup akomodatif, namun jelas dapat diketahui kepemimpinan Azmun Jaafar lebih memiliki kharismatik dan dukungan dari masyarakat dibandingkan dengan kepemimpinan Rustam Effendi. Hal ini karena Azmun merupakan keinginan dari masyarakat sedangkan Rustam merupakan lanjutan dari Azmun akibat dari tersandung masalah hukum.

Menurut Armstrong (2003), pemimpin kharismatik sangat bergantung pada kepribadian mereka. Kualitas-kualitas inspirasional (pemberi semangat) serta “aura”-nya. Seringkali, mereka adalah pemimpin yang visioner, yang memiliki orientasi prestasi, pengambil resiko yang penuh perhitungan, dan juga merupakan komunikator yang baik. Adapun para pemimpin non-kharismatik sangat bergantung pada pengetahuan mereka (wewenang jatuh kepada orang yang memiliki pengetahuan tersebut), kepercayaan diri dan ketenangan diri serta pendekatan analisis dalam menangani permasalahan.

- b. Komunikasi politik (koordinasi dan jalinan kerjasama antara bupati dengan legislatif (DPRD) dalam menyikapi harapan masyarakat yang berkembang)

Azmun Jaafar mempunyai latar belakang sebagai PNS dan birokrat karir. Umumnya hubungan terjalin baik dan dinamis. Pada kepemimpinan Rustam Effendi berjalan baik, tapi dalam status Plt, ia kadang-kadang lambat mengambil keputusan atau menandatangani surat keputusan sebagai kepala daerah. Contohnya dalam pengesahan RAPBD sering terlambat disahkan DPRD, karena Plt Bupati menganggap ia tidak berwenang menandatangani, lalu memerlukan beberapa kali konsultasi ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta sebelum memutuskan sesuatu, karena ragu dalam status Plt Bupati. Kemudian saat Rustam Effendi menjadi bupati sudah lebih terpola secara normal dan baik, tapi trauma masa lalu kelihatannya kadang-kadang membayangi juga. Saat Rustam bersama Harris kepemimpinan mulai membaik. Apalagi cukup terbantu dengan pengalaman Harris dua periode menjadi Ketua DPRD.

Kedudukan kepala daerah di luar organisasi pemerintah daerah adalah dengan pihak lembaga legislatif atau DPRD. Secara bersama-sama kepala daerah bekerjasama dengan DPRD dalam berbagai hal. Menurut Yudoyono (2002) untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang, antara legislatif dan eksekutif diberikan kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Artinya diantara kedua institusi ini tidak dikenal hubungan secara

hirarki atau tidak berlaku hubungan atasan dan bawahan.

Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak bisa memasuki ranah politik dan DPRD tidak bisa memasuki ranah administrasi pemerintahan daerah. Dalam hubungan kemitraan DPRD dengan Pemda pada tahap operasionalisasi kebijakan yang telah disepakati bersama, tetap saja dimungkinkan adanya perbedaan-perbedaan pemikiran, pandangan, pendapat, sikap dan perilaku. Koordinasi antara kedua lembaga ini dimaksudkan bukan untuk melarang atau meniadakan perbedaan, tetapi koordinasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya mis-informasi terhadap langkah-langkah kebijakan yang harus diambil kepala daerah.

Proses Pembuatan Kebijakan

- a. Usulan kebijakan (tindakan bupati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan yang dibuat atas dasar harapan masyarakat luas)

Semasa kepemimpinan Azmun Jaafar, proses pembuatan kebijakan secara umum berlangsung baik dan normal, sampai kemudian ia menghadapi masalah hukum. Pada masa Rustam pembuatan kebijakan cukup terakomodir. Begitu pun saat ia menjadi bupati tanpa wakil lebih kurang sama keadaannya. Barulah pada masa Rustam berpasangan dengan Harris, maka kondisi berlangsung lebih baik. Pada intinya proses pembuatan kebijakan pada masa keduanya berjalan sebagaimana mestinya karena lebih mengedepankan aspirasi dari masyarakat.

- b. Dukungan elit (dukungan elit politik dalam hal ini anggota DPRD atas usulan kebijakan yang dibuat bupati selama ini)

Dukungan DPRD Pelalawan kepada Azmun sebagai bupati cukup baik dan cukup dinamis. Kemudian pada saat Rustam juga berjalan cukup baik. Status PLT membuat Rustam harus sering berkoordinasi dan berkonsultasi. Saat menjadi bupati tanpa wakil cukup baik dan lebih harmonis lagi saat berpasangan dengan Harris.

Dukungan elit politik dalam hal ini anggota DPRD atas usulan kebijakan yang dibuat bupati selama ini terhadap kepemimpinan Azmun lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan Rustam. Hal ini karena Azmun berangkat dari dunia politik, sedangkan Rustam berangkat dari kalangan akademisi dan ulama.

- c. Pengambilan keputusan (tindakan bupati dalam merealisasikan harapan masyarakat dalam bentuk wujud nyata pembangunan)

Umum masyarakat Kabupaten Pelalawan berpandangan bahwa Azmun cukup berhasil meletakkan pondasi pembangunan. Ketika dimekarkan dari Kabupaten Kampar, Pelalawan hampir tidak punya apa-apa. Di bawah kepemimpinan Azmun, Pelalawan kemudian berkembang pesat. Rustam bisa dikatakan hanya melanjutkan program-program terdahulu, pembangunan tetap ada, tetapi tidak begitu menonjol. Masa Rustam-Harris mulailah menggeliat lagi pembangunan, tapi waktu mereka hanya enam bulan, sehingga tidak begitu nampak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan Azmun dalam hal tindakan merealisasikan harapan masyarakat dalam bentuk wujud nyata pembangunan cukup baik dan sesuai dengan harapan masyarakat bila dibandingkan dengan Rustam yang lebih kepada pelayanan publik. Masa kepemimpinan Rustam ia hanya bersifat melanjutkan kepemimpinan saja.

Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan adalah meliputi: *Planning* antara lain kejelasan visi (kejelasan visi bupati yang menjadi acuan masa pemerintahannya); ketegasan misi (ketegasan misi bupati dalam rangka mencapai visi pada masa pemerintahannya); strategi pencapaian visi (penerapan strategi dalam rangka mencapai misi bupati pada masa pemerintahannya); *Organizing* meliputi: Pembagian kerja (kejelasan pembagian kerja yang dilaksanakan bupati dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan); Kompetensi pejabat penyelenggara (kompetensi pejabat yang diangkat untuk memangku jabatan pada masa pemerintahannya); Kehandalan pejabat

(kehandalan pejabat yang diangkat bupati dalam rangka melaksanakan visi dan misi bupati); dan situasi kerja di lingkungan pemerintah (kondisi atau situasi kerja pejabat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan); *Actuating* meliputi: Komunikasi (jalinan komunikasi antara bupati dengan pejabat dan dengan pelaksana tugas di lapangan); Alokasi sumberdaya manusia (kecukupan alokasi sumberdaya manusia dalam rangka pencapaian program bupati dan penyelenggaraan pemerintahan); Alokasi dana (ketersediaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi bupati pada masa pemerintahannya); Alokasi fasilitas (kesiapan fasilitas pendukung seperti gedung, sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya); Dukungan pelaksana (dukungan dari pejabat pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab bupati menyelenggarakan pemerintahan); dan Birokrasi (penerapan birokrasi dalam berurusan dilihat secara umum oleh masyarakat); dan *Controlling* yang meliputi: Efektifitas (hasil pencapaian visi dan misi oleh bupati selama masa pemerintahannya); Efisiensi (efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai visi dan misi dalam masa pemerintahannya); dan Akuntabilitas (pertanggung jawaban bupati dalam pencapaian visi dan misi pemerintahannya).

Planning

- a. Kejelasan visi (kejelasan visi bupati yang menjadi acuan masa pemerintahannya)

Kejelasan visi bupati yang menjadi acuan masa pemerintahan saat Azmun cukup jelas dengan menerapkan visi dan misinya adalah terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat beradat, beriman, bertaqwa, dan berbudaya Melayu tahun 2030. Masa Rustam PLT dan bupati definitif serta diwakili Harris, ia hanya melanjutkan misi yang sudah ada saja. Bisa dikatakan Azmun lebih berani bermimpi dibandingkan Rustam yang hanya melanjutkan visi yang sudah ada dan membuat pemerintahannya tidak ada masalah.

- b. Ketegasan misi (ketegasan misi bupati dalam rangka mencapai visi pada masa pemerintahannya)

Ketegasan misi bupati dalam rangka mencapai visi pada masa pemerintahannya saat Azmun sudah cukup tegas, yakni meningkatkan kualitas hidup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, pendidikan kesehatan, bermartabat dan berbudaya; menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan; meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agroindustri dan agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari; menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat. Masa Rustam Plt dan bupati definitif serta diwakili Harris, ia hanya mengikuti misi tersebut. Masalah ketegasan misi bupati dalam rangka mencapai visi pada masa pemerintahannya juga Azmun lebih agresif sedangkan Rustam hanya melanjutkannya saja.

- c. Strategi pencapaian visi (penerapan strategi dalam rangka mencapai misi bupati pada masa pemerintahannya)

Penerapan strategi dalam rangka mencapai misi bupati pada masa pemerintahan Azmun sudah cukup terencana dengan baik. Kemudian masa Rustam Plt lebih operasional dan definitif sama saja serta diwakili Harris tetap sama. Penerapan strategi dalam rangka mencapai misi bupati pada masa pemerintahan Azmun lebih bisa memandang strategi dalam meningkatkan kesejahteraan Pelalawan ke depannya.

Organizing

- a. Pembagian kerja (kejelasan pembagian kerja yang dilaksanakan bupati dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan)

Kejelasan pembagian kerja yang dilaksanakan bupati dalam rangka melaksanakan kegiatan masa pemerintahan Azmun pembagiannya tidak

mendetail dan diarahkan kepada siapa saja yang bisa mengikuti langkahnya saja. Kemudian pada saat Rustam Plt lebih melanjutkannya dan masa definitif ia memilih orang-orang profesional sesuai dengan kemampuan, baik secara akademik maupun pengalaman di lapangan serta diwakili Harris melanjutkan langkah sebelumnya. Rustam dalam memberikan kejelasan pembagian kerja yang dilaksanakan bupati dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan lebih jelas dibandingkan dengan Azmun.

- b. Kompetensi pejabat penyelenggara (kompetensi pejabat yang diangkat untuk memangku jabatan pada masa pemerintahannya)

Kompetensi pejabat yang diangkat untuk memangku jabatan pada masa pemerintahan Azmun tidak menjadi pertimbangan utama, yang penting loyalitas yang tinggi dan tidak kenal lelah. Kemudian masa Rustam Plt dan definitif serta diwakili Harris diutamakan pejabat yang memiliki kompetensi dalam bekerja sehingga pekerjaan dikerjakan oleh orang yang tepat. Mengenai kompetensi pejabat yang diangkat untuk memangku jabatan pada masa pemerintahannya Rustam lebih baik dibandingkan dengan Azmun.

- c. Kemandalan pejabat (kemandalan pejabat yang diangkat bupati dalam rangka melaksanakan visi dan misi bupati)

Kemandalan pejabat yang diangkat bupati dalam rangka melaksanakan visi dan misi bupati masa Azmun cukup handal, khususnya di lapangan. Kemudian saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris kemandalannya secara teoritis, namun secara praktis kurang mendapatkan perhatian. Masalah kemandalan pejabat yang diangkat bupati dalam rangka melaksanakan visi dan misi bupati lebih dapat diandalkan masa kepemimpinan Azmun dibandingkan dengan Rustam.

- d. Situasi kerja di lingkungan pemerintah (kondisi atau situasi kerja pejabat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan)

Kondisi atau situasi kerja pejabat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan saat Azmun cukup kondusif walaupun sebagian dari pegawai ada yang merasa kurang puas. Kemudian pada

saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili Harris cukup kondusif secara administratif, namun secara praktek di lapangan kurang berjalan. Masalah kondisi atau situasi kerja pejabat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sama-sama kondusif di lapangan antara Azmun dengan Rustam.

Aktuating

- a. Komuikasi (jalinan komunikasi antara bupati dengan pejabat dan dengan pelaksana tugas di lapangan)

Jalinan komunikasi antara bupati dengan pejabat dan dengan pelaksana tugas di lapangan saat Azmun berjalan dengan baik. Kemudian pada saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama. Jalinan komunikasi antara bupati dengan pejabat dan dengan pelaksana tugas di lapangan yang dijalin berjalan dengan lancar dari kedua pimpinan.

- b. Alokasi sumberdaya manusia (kecukupan alokasi sumberdaya manusia dalam rangka pencapaian program bupati dan penyelenggaraan pemerintahan)

Kecukupan alokasi sumberdaya manusia dalam rangka pencapaian program bupati dan penyelenggaraan pemerintahan saat Azmun mencukupi. Kemudian pada saat pada Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Untuk kecukupan alokasi sumberdaya manusia dalam rangka pencapaian program bupati dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan informasi juga memadai.

- c. Alokasi dana (ketersediaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi bupati pada masa pemerintahannya)

Ketersediaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi bupati pada masa pemerintahannya saat Azmun cukup memadai. Kemudian saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Masalah ketersediaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi bupati pada masa pemerintahannya juga sama-sama memadai dalam rangka membangun daerah.

- d. Alokasi fasilitas (kesiapan fasilitas pendukung seperti gedung, sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya)

Kesiapan fasilitas pendukung seperti gedung, sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya saat Azmun cukup memadai. Kemudian saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Mengenai kesiapan fasilitas pendukung seperti gedung, sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya sama-sama siap mendukung pembangunan Pelalawan.

- e. Dukungan pelaksana (dukungan dari pejabat pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab bupati menyelenggarakan pemerintahan)

Dukungan dari pejabat pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab bupati menyelenggarakan pemerintahan saat Azmun cukup mendukung. Kemudian pada saat pada Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Berbicara masalah dukungan dari pejabat pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab bupati menyelenggarakan pemerintahan sama-sama mendapatkan dukungan dari masyarakat dan elit.

- f. Birokrasi (penerapan birokrasi dalam berurusan dilihat secara umum oleh masyarakat)

Penerapan birokrasi dalam berurusan dilihat secara umum oleh masyarakat saat Azmun cukup baik, kemudian pada saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Masalah penerapan birokrasi dalam berurusan dilihat secara umum oleh masyarakat pada umumnya sudah baik dipandang masyarakat, khususnya pada masa Rustam, karena pelayanan publik menjadi andalan Rustam.

Controlling

- a. Efektifitas (hasil pencapaian visi dan misi oleh bupati selama masa pemerintahannya)

Hasil pencapaian visi dan misi oleh bupati selama masa pemerintahannya saat Azmun cukup berhasil. Kemudian saat pada Rustam Plt

dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Hasil pencapaian visi dan misi oleh bupati selama masa pemerintahannya sudah tercapai dengan baik.

- b. Efisiensi (efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai visi dan misi dalam masa pemerintahannya)

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai visi dan misi dalam masa pemerintahan saat Azmun cukup efisien. Kemudian saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris cenderung sama saja. Dalam rangka efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai visi dan misi dalam masa pemerintahan keduanya sudah efisien penggunaannya di lapangan.

- c. Akuntabilitas (pertanggung jawaban bupati dalam pencapaian visi dan misi pemerintahannya)

Pertanggungjawaban bupati dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan saat Azmun cukup baik. Kemudian saat Rustam Plt dan definitif serta diwakili oleh Harris sama saja. Pertanggungjawaban bupati dalam pencapaian visi dan misi pemerintahannya sudah diberikan dengan baik dari kedua pimpinan tersebut.

Dari data dan penjelasan di atas, maka dapat diketahui posisi politik kepala daerah pada periode normal dari mulai dilantik sampai nonaktif dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik. Hal ini pada masa pemerintahan Azmun dari sisi kegiatan politik lebih menonjol dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian posisi politik kepala daerah pada periode Plt sampai dengan definitif dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan hanya melanjutkan pemerintahan transisi Azmun yang mengalami permasalahan hukum.

Posisi politik kepala daerah pada periode bupati tanpa wakil bupati dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, Rustam berfokus pada masalah pelayanan publik. Hal ini membuat nilai tawar pada Rustam kurang di masyarakat. Rustam masih trauma meng-

hadapi permasalahan hukum yang terjadi pada Azmun, sehingga dia berusaha menjalankan pemerintahannya dengan normal dan stabil.

Terakhir pada posisi politik kepala daerah pada periode bupati didampingi kembali oleh wakil bupati dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, juga hanya melanjutkan namun sudah mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini karena Harris adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan sehingga dapat menggunakan pengaruhnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

SIMPULAN

Posisi politik kepala daerah pada periode normal dari mulai dilantik sampai non-aktif dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik. Hal ini pada masa pemerintahan Azmun dari sisi kegiatan politik lebih menonjol dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian posisi politik kepala daerah pada periode Plt sampai dengan definitif dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan hanya melanjutkan pemerintahan transisi Azmun yang mengalami permasalahan hukum.

Posisi politik kepala daerah pada periode bupati tanpa wakil bupati dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, Rustam berfokus pada masalah pelayanan public. Hal ini membuat nilai tawar pada Rustam kurang di masyarakat. Rustam masih trauma menghadapi permasalahan hukum yang terjadi pada Azmun, sehingga dia berusaha menjalankan pemerintahannya dengan normal dan stabil. Pada posisi politik kepala daerah pada periode bupati didampingi kembali oleh wakil bupati dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, juga hanya melanjutkan namun sudah mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini karena Harris adalah mantan Ketua DPRD sehingga dapat menggunakan pengaruhnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan .

DAFTAR RUJUKAN

- Armstrong, 2003, *Managing Activities*. London: Institute Of Personel And Development
- Carlton Clymer Rodee, 2008, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Nazir Muhammad, 1998, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Pamudji, 1995, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sentosa Sembiring, 2009, *Pemerintahan Daerah (Pemda)*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Wahjosumidjo, 1992, *Kepemimpinan*, Tinjauan Teoritik dan *Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wignyowiyoto, 2002, *Leadership-Followership Hubungan Dinamis Kepemimpinan-Keanakbuahan Sebagai Kunci Sukses Organisasi*. Jakarta: PPM
- Winardi, 2003, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada